

**PERDAMAIAN DAN MULTIKULTURALISME DI INDONESIA**  
(Strategi Dakwah Multikulturalisme Dalam Pertentangan Laten  
Radikalisme Dan Bias Konflik)

**Rojabi Azharghany**

Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid  
[azharghany@unuja.ac.id](mailto:azharghany@unuja.ac.id)

**Abstrak**

Indonesia adalah sebuah negara-bangsa yang memiliki keanekaragaman yang kompleks. Keragaman di satu sisi merupakan modal sosial yang penting dalam menegakkan demokrasi, namun pada sisi lain merupakan tantangan karena memiliki potensi untuk membawa disintegrasi. Multikulturalisme akan selalu menghadapi tantangan dari para pendukung radikalisme baik radikalisme agama dan etnis. Konflik agama dan etnis di Indonesia membutuhkan konfigurasi baik secara vertikal dan horizontal. Dalam konflik agama, faktor yang paling dominan adalah intoleransi agama sedangkan konflik etnis menyebabkan banyak tindakan ketidakadilan ekonomi dan penyalahgunaan budaya. Bangsa Indonesia, sejak berdirinya, telah masuk ke dalam kehidupan multikultural di mana setiap tindakan radikalisme apakah atas nama agama atau etnis bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa dan konstitusi negara. Melalui sudut pandang dakwah multikulturalisme, tulisan ini mengarahkan pada studi perdamaian terhadap pertentangan laten radikalisme dan bias konflik

**Kata kunci:** dakwah multikultural, radikalisme, sosiologi Konflik

**Abstract**

*Indonesia is a nation-state which has a high-level of diversity. The diversity on the one side is the sosial capital which is important in upholding democracy, but on the other hand diversity is also a challenge because it has potential to bring disintegration. Multiculturalism will always face challenges from the advocates of radicalism of both religious and ethnic radicalism. Configuration of religious and ethnic conflict in Indonesia takes both vertically and horizontally. In religious conflict, the most dominant factor is the intolerance of religion while the ethnic conflict causes more by the act of economic injustice and abuse of culture. The Indonesia nation, since its establishment, has come out into multicultural life in which every act of radicalism whether in the name of religion or ethnic is contrary to the noble values of the nation and the state constitution. Through the perspective of multiculturalism preaching, this paper directs the peace study on the latent opposition of radicalism and conflict bias*

**Keywords:** *dakwah multicultural, radikalisme, sosiologi konflik*

### **Pendahuluan**

Indonesia merupakan sebuah Negara yang memiliki tingkat keragaman tertinggi di dunia. Negara kepulauan ini dalam dirinya terkandung keragaman budaya dan agama yang menjadi kekayaan tersendiri dan membanggakan. Sebagai sebuah Negara multicultural, Indonesia diperhadapkan pada tantangan luar biasa untuk menjaga keragaman ini agar tidak menjadi sesuatu yang bersifat destruktif. Oleh karena itu, meletakkan nilai utama pada penghargaan kepada kemajemukan dan penetapan ideology Pancasila, menjadi langkah preventif untuk melindungi bangsa ini dari perpecahan dari dalam maupun ancaman dari luar yang berupaya memecah belah bangsa ini.

Pancasila sebagai dasar Negara telah meletakkan nilai dasar semangat multikulturalitas yakni semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bahwa dalam Negara kesatuan Republik Indonesia terdapat banyak suku bangsa, budaya dan keyakinan keberagaman adalah fakta namun pada dasarnya tidak satupun dari budaya dan keyakinan keberagaman mengklaim diri sebagai yang paling baik untuk mengelola kehidupan berkebangsaan. Semangat mendirikan Negara berbasis etnik dan agama merupakan hal yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar Pancasila dan bertentangan dengan semangat ke-Indonesia-an.

Meskipun demikian, beragam riak dalam percaturan berbangsa menyangkut hubungan antara Negara dan beragam keyakinan adat dan agama seringkali menjadi noktah hitam fondasi kebernegeraan yang multikulturalistik. Sejak perjuangan mempertahankan kemerdekaan beberapa kali terjadi upaya pemberontakan dan pembangkangan atas nama etnik semisal RMS dan agama semisal gerakan DI TII di Jawa Barat, Aceh dan Sulawesi Selatan. Secara sosiologis, ketegangan antara pihak penyokong multikulturalisme dengan basis gerakan radikalisme dan fundamentalisme berazaskan adat dan agama cenderung bersifat laten. Oleh karena itu, pemerintah diperhadapkan pada sebuah tantangan untuk menjalankan pembangunan yang tidak hanya menekankan pertumbuhan tapi juga pemerataan. Hal inimenjadi syarat niscaya agar bangsa ini tidak terkoyak ke dalam sebuah arus pertentangan tak bertepi.

## Tinjauan Teoritis Atas Multikulturalisme, Puritanisme Dan Konflik Multikulturalisme

Cecil A Foster dalam kata pengantar pada buku Dawn Zinga<sup>1</sup> tentang *Navigating Multiculturalism : negotiating Change* menyatakan bahwa :

*“Ultimately, multiculturalism is about how we live together. It is about humanity and what types of groups human beings form, how we run these groups, and who may have membership in any of them.”*

Jadi, menurut Cecil A Foster multikulturalisme pada azasnya adalah tentang bagaimana kita bisa hidup bersama secara harmonis. Ini tentang kemanusiaan dan tentang beberapa kelompok manusia dan bagaimana kita menjalankan dan siapa saja yang mungkin menjadi anggota bagi mereka.

Multikulturalisme adalah sebuah konsep yang berkembang yang dilatarbelakangi perkembangan teknologi terutama teknologi informasi dan komunikasi. Menurut Ali Imran A.M<sup>2</sup> bahwa munculnya multikulturalisme dilatarbelakangi antara lain oleh adanya tiga teori sosial yang menjelaskan hubungan antar individu dalam masyarakat dengan beragam latar belakang agama, etnik, bahasa dan budaya.

Menurut Ricardo L Garcia dalam Ali Imron<sup>3</sup> teori sosial tersebut antara lain :

1. Melting Pot 1: Anglo Compormity dimana individu-individu yang beragam latar belakang seperti agama, etnik, bahasa dan budaya disatukan kedalam satu wadah yang dominan.
2. Melting Pot 2; Ethnic Synthesis dimana individu-individu yang latar belakangnya disatukan kedalam suatu wadah baru, identitas agama, etnik, bahasa dan budaya asli para anggotanya melebur menjadi identitas yang baru
3. Cultural Pluralism; Masaic Analogy dimana individu-individu yang beragam latar belakang agama, etnik, bahasa dan budaya memiliki hak untuk mengekspresikan

---

<sup>1</sup> Dawn Zinga, *Navigating Multiculturalism: Negotiating Change*, Cambridge Scholars Press, Newcastle UK, 2006, hal 106.

<sup>2</sup> Ali Imron A.M., *Resolusi Konflik Antaretnis dan Antaragama: Perspektif Multikultural*, Jurnal Kebudayaan Akademika, Vol 4, No 1, April 2006.

<sup>3</sup> *Ibid.*

identitas budayanya secara demokratis dengan tidak meminggirkan budaya kelompok minoritas. Masyarakat yang warganya berlatar belakang budaya Jawa, Batak dan Barat misalnya tiap individu berhak menunjukkan identitas budayanya dan mengembangkannya tanpa saling mengganggu.

Robinson dalam Ali Imran A.M<sup>4</sup>, menyatakan bahwa terdapat 3 perspektif dalam pengembangan multikulturalisme yakni :

1. Perspektif Cultural Assimilation yakni model yang menunjuk pada proses asimilasi warga masyarakat dari berbagai kebudayaan atau masyarakat subnasional kedalam suatu *core cultural* atau *core society*.
2. Perspektif Cultural Pluralism yang memberikan penekanan pentingnya hak bagi semua kebudayaan dan masyarakat subnasional untuk memelihara dan mempertahankan identitas kultural masing-masing.
3. Perspektif Cultural Synthesis yang merupakan sintesis dari perspektif asimilasionis dan pluralis yang memberikan penekanan pentingnya proses terjadinya eksletisme dan sintesis didalam diri warga masyarakat dan terjadinya perubahan dalam berbagai kebudayaan dan masyarakat subnasional.

Syamsul Arifin<sup>5</sup> menjelaskan pandangan Parekh dalam bukunya , *Rethinking Multiculturalism* (2008) dan dalam artikel Parekh yang berjudul: *What is Multiculturalism?* (<http://www.india-seminar.com>).

*Parekh mengemukakan tiga pandangan mendasar dalam multikulturalisme. Pertama, manusia terikat secara kultural (culturally embedded) dalam arti mereka tumbuh dan hidup dalam sebuah dunia yang telah terstruktur secara kultur. Meskipun manusia terikat dengan dunia budayanya, menurut Parekh, tidak berarti manusia selalu berada dalam posisi deterministik dengan budaya asalnya. Manusia tetap bisa mengembangkan budayanya sendiri melampaui budaya asalnya. Dengan pandangan ini, Parekh rupanya ingin menghindari dari mitos dan kerancuan berfikir (fallacy)*

---

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> Syamsul Arifin, *Studi Islam Kontemporer; Arus Radikalisasi dan multikulturalisme di Indonesia*, Malang;Intrans Publishing, 2015, hal 17.

*yang berasal dari kalangan primordial-esensialis, bahwa budaya merupakan satuan yang dapat memenuhi dirinya sendiri (self contained units) yang dianggap memiliki spirit khusus, etos atau prinsip-prinsip yang terorganisasi, dan yang dengan mudah bisa diindividualisasikan dan dibedakan satu sama lain.*

Pandangan Parekh ini sangat sejalan dengan konsep relativitas budaya, dimana budaya-budaya yang ada merupakan hasil dinamisasi yang akan selalu berubah dan tidak akan pernah berujung pada sesuatu yang berakhir dan selesai atau bahkan mencapai titik yang sempurna dan absolut. Karena sesuatu yang selalu berubah adalah tidak pernah pasti, dan sesuatu yang tidak pernah pasti bukanlah kebenaran yang paling sejati. Hal ini kemudian dikuatkan dengan pandangan Parekh yang kedua.

*Budaya yang berbeda merepresentasikan sistem makna dan visi tentang kehidupan yang baik yang juga berlainan. Karena masing-masing menyadari keterbatasan kapasitas dan emosi manusia dan hanya mampu menangkap sebagian saja dari totalitas eksistensi manusia, ia membutuhkan budaya-budaya lain untuk membantu memahami dirinya secara lebih baik, mengembangkan cakrawala intelektualnya, merentangkan imajinasi, dan menyelamatkannya dari narsisme untuk menjaganya dari godaan untuk mengabsolutkan dirinya.*

*Ketiga, setiap budaya secara internal bersifat plural, dan merefleksikan sebuah perbincangan yang berkesinambungan diantara tradisi-tradisi dan jalinan pemikiran yang berbeda. Ini bukan berarti bahwa ia tidak memiliki koherensi dan identitas, tetapi bahwa identitasnya itu plural, cair dan terbuka.<sup>6</sup>*

Dalam Annual Report The Canadian Multiculturalism Act<sup>7</sup> dinyatakan bahwa ada 4 prioritas utama program multikulturalisme yaitu :

1. Membangun kapasitas minoritas ethno-cultural/rasial untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan public (Civic Partisipation)

---

<sup>6</sup> Ibid, hal 17-18

<sup>7</sup> Annual Report The Canadian Multiculturalism Act, 2005-2006, Canadian Heritage, [www.multiculturalism.pch.gc.ca](http://www.multiculturalism.pch.gc.ca)

## Rojabi Azharghany | Perdamaian dan Multikulturalisme

2. Membantu lembaga-lembaga public untuk mendobrak hambatan sistemik bagi penduduk (Perubahan Instiutusi)
3. Membantu lembaga-lembaga federal untuk mengintegrasikan pertimbangan keragaman kedalam kebijakan, program dan layanan ( Perubahan institusi federal)
4. Mendorong masyarakat secara luas untuk terlibat dalam dialog dan tindakan berkelanjutan untuk memerangi rasisme (anti-rasisme, anti-kebencian, pemahaman lintas budaya)

Jenny Bourne<sup>8</sup>, dalam *In Defence of Multiculturalism*, menyatakan :

*“Multiculturalism as policy emanated from both central and local government as a conscious attempt to answer racial inequality (and specially the resistances to it a er the “riots” of 1981 and 1985) with cultural solutions”.*

Multikulturalisme sebagai sebuah kebijakan dihasilkan oleh 2 pihak yakni pemerintah pusat dan daerah yang dilaksanakan akibat kepedulian terhadap ketidakadilan rasial dengan solusi kultural.

### Radikalisme

Secara kebahasaan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1995) dinyatakan bahwa radikalisme ialah paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pem- baharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastic. Dalam Ensiklopedia Indonesia (1984) dinyatakan bahwa radikalisme adalah semua aliran politik, yang para pengikutnya menghendaki konsekwensi yang ekstrim, setidaknya-tidaknya konsekwensi yang paling jauh dari pengejawantahan ideology yang mereka anut. Sementara itu menurut Pius A. Partanto dan M. Dahlan al Barry (1994) menyatakan bahwa radikalisme ialah paham politik kenegaraanyang menghendaki adanya perubahan dan perombakan besar sebagai jalan untuk mencapai taraf kemajuan.

Syamsul Bakri<sup>9</sup> menyatakan bahwa radikalisme adalah gerakan yang berpandangan kolot dan sering menggunakan kekerasan dalam mengajarkan keyakinan mereka. Istilah

---

<sup>8</sup> Jenny Bourne, *In Defence of Multiculturalism*, Institute of Race Relation, UK 2007, hal 57.

<sup>9</sup> Syamsul Bakri, *Islam dan Wacana Radikalisme Agama Kontemporer*, Jurnal DINIKA Vol. 3 No. 1, January, 2004

fundamentalisme dan radikalisme dalam perspektif barat sering dikaitkan dengan sikap ekstrim, kolot, stagnasi, konservatif, anti-barat dan eras dalam mempertahankan pendapat bahkan kekerasan fisik.

Dalam Merriam Webster Learner Dictionary dinyatakan bahwa radikalisme adalah :

*“The opinion and behavior of people who favor extreme changes especially in government: radical political and behavior.”*

Jadi radikalisme adalah opini dan perilaku manusia yang menyukai perubahan secara ekstrim dalam pemerintahan: politik radikal dan perilaku radikal.

Menurut Grigorij Mezeznikov<sup>1</sup> menyatakan latar belakang radikalisme sebagai berikut :

*“The fact that the country has become much more open with respect to the outer world enabled extremists and radical nationalists to communicate with representatives of the far right abroad, take over certain activity patterns and even coordinate specific policies and activities”*

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa kemunculan radikalisme disebabkan oleh semakin terbukanya sebuah Negara terhadap nilai-nilai dari luar yang memungkinkan terjadinya reaksi dari kaum ekstrimis dan nasionalisme radikal. Mereka turut menyampaikan aspirasi bahkan pada beberapa kesempatan mengambil alih aktivitas kebijakan yang telah ditetapkan oleh pengambil kebijakan yakni Negara. Untuk kasus di Indonesia kelompok radikal tertentu cenderung mengambil alih peran Pemerintah dalam menegakkan hukum bahkan mereka terkadang melampaui dengan memakai kekerasan sebagai alat yang ampuh. Lihatlah aksi kasus FPI terhadap “tempat maksiat” dan “aliran sempalan”.

Dalam perkembangannya terutama pasca serangan teroris ke gedung kembar WTC September 2001 stigmatisasi radikalisme disematkan pada kelompok Islam. Alan Richard (2002) menyatakan bahwa :

---

<sup>1</sup> Grigorij Mezeznikov, *National and Right-Wing Radicalism in the New Democracies: Slovakia*, Paper for the workshop of the Friedrich Ebert Foundation on “Right-wing extremism and its impact on young democracies in the CEE countries”, 2009.

*“On 11 September 2001 the united States was attacked by utopian fanatics, followers of a movement inspired by an exceptionally narrow interpretation of Islam. Although millions of Muslims deplored the attacks, millions of others also expressed some degree of sympathy for the terrorist. Why do this movement and other radical Islamic political movements resonate in the middle East and the wider Muslim world? The answer, of course, is profoundly complex. Sosial, economic, political and cultural factors, interacting over many decades, have spawned this particular phenomenon. Space here permits only sketch of the sosial, economic and political issues.”*

Islam dan radikalisme semakin menjadi isu yang menjadi semakin hangat dibicarakan. Namun bukan berarti bahwa kelompok keagamaan lain ataupun suku lain tidak memiliki unsur radikalitas. Perjuangan Suku Quebeq di Canada juga menjalankan radikalisme demi terwujudnya “kemerdekaan” yang dituntutnya, radikalitas Suku Dayak pada suku Madura pada konflik etnis di Sambas, perjuangan kemerdekaan menuntut keterlepasan dari Negara induk seperti yang terjadi di Aceh dan Timor-Timur menjadi mozaik konflik antara radikalisme agama dan etnis dengan Negara.

### **Konflik**

Novri Susan (2009) memberikan uraian tentang pengertian konflik yaitu :

*“konflik adalah unsur terpenting dalam kehidupan manusia, karena memiliki fungsi positif (George Simmel,1918; Lewis Coser, 1957) konflik menjadi dinamika sejarah manusia (Karl Marx, 1880/2003;ibn Kaldum 1332-1406), konflik menjadi entitas hubungan sosial (Max Weber,1918/1947;Ralf Dahrendorf, 1959) dan konflik adalah bagian dari proses pemenuhan kebutuhan dasar manusia (Maslow, 1954; Max Neef, 1987; John Burton, 1990; Marshal Rosemberg, 2003). Manusia adalah makhluk konfliktis (homo conflictus) yaitu makhluk yang selalu terlibat dalam perbedaan, pertentangan dan persaingan baik sukarela maupun terpaksa. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun Poerwadarminta<sup>1</sup> konflik*

---

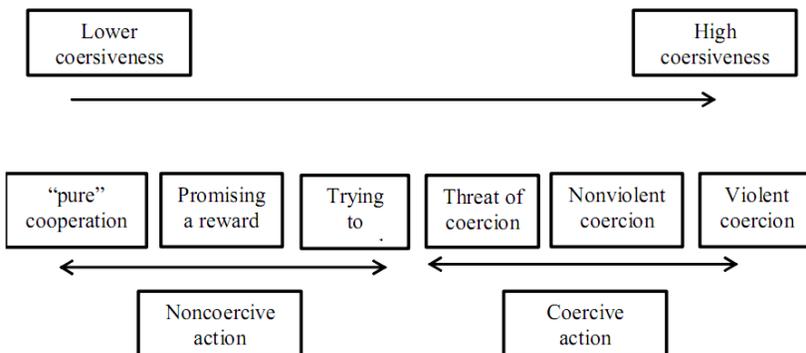
<sup>1</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka. Edisi Kedua, cet. th. 1995

*berarti pertentangan atau percekocan. Pertentangan sendiri bisa muncul ke dalam bentuk pertentangan ide maupun fisik antara 2 belah pihak berseberangan. Francis menambahkan unsur persinggungan dan pergerakan sebagai aspek tindakan sosialnya (Francis, 2006;7). Sehingga secara sederhana konflik adalah pertentangan yang ditandai oleh pergerakan dari beberapa pihak sehingga terjadi persinggungan. Pengertian konflik diatas sesuai dengan apa yang didefenisikan Pruitt dan Rubin dengan mengutip Webster bahwa konflik berarti persepsi mengenai perbedaan kepentingan (perceived divergence of interest) , atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dicapai secara simultan. “*

Konflik dapat muncul dalam skala yang berbeda bergantung jenisnya yakni :

1. *Interpersonal Conflict* yakni konflik antar manusia
2. *Intergroup Conflict* yakni konflik antar kelompok
3. *Vertical Conflict* yakni konflik antara kelompok dengan negara
4. *Interstate Conflict* yakni konflik antar Negara.

Dalam teori Tindakan Koersif dan Fase Konflik, Wehr dan Bartos menggunakan logika sebab akibat untuk melihat tingkat tindakan koersif (*degree of coersiveness*) dari suatu hubungan konflik. Peningkatan tindakan dari pihak X akan merangsang peningkatan tindakan Y. Dibawah ini akan disajikan gambar tentang figure tingkat tindakan koersif:



Mengutip Wehr dan Bartos, Novri Susan (2009) memaparkan bahwa tingkat tindakan koersif berada dalam suatu hubungan konflik akan menciptakan dinamika konflik. Dinamika konflik ditandai terlebih dahulu oleh fase-fase konflik. Wehr dan Bartos membagi konflik menjadi 2 fase yaitu:

1. Fase solidaritas konflik (conflict solidarity), yakni terciptanya konflik menuju kompleksitas melalui keterlibatan individu-individu yang lain. Proses ini melalui 3 proses yakni; (1) terdapat interaksi individu-individu anggota secara intensif (2) ada rasa suka terhadap anggota lain (3) dan jika ada atau terdapat kesamaan (kemiripan) kepercayaan (keyakinan) nilai-nilai dan norma. Ketiga proses ini akan teraktualisasikan, dipicu, oleh adanya fakta kekejian (hostility). Ada 2 bentuk kekejian, yaitu frustrasi dan keluhan (grievances). Solidaritas konflik dicirikan oleh beroperasinya ideology dalam kelompok, memberi doktrin dan semangat perlawanan. Selanjutnya terdapat pengorganisasian anggota dan struktur sehingga bisa dirumuskan berbagai strategi konflik. Kemudian terakhir adalah mobilisasi massa dengan mengefektifkan seluruh sumber dayanya untuk memenangkan konflik.
2. Fase sumber-sumber konflik (conflict resources), yaitu proses kelompok-kelompok berkonflik memanfaatkan instrument tertentu untuk menghadapi konflik. Misalnya satu Negara hendak berperang dengan Negara lain, maka yang dibutuhkan adalah tentara, peralatan tempur dan logistic. Seorang istri yang menggugat cerai suaminya, ia membutuhkan keamanan finansial dan keamanan.

Dengan Mill, Novri Susan (2009) membuat panduan pemetaan konflik untuk melihat pihak-pihak yang bertikai dan persoalannya sebagai berikut :

1. Siapa yang menjadi inti pihak yang bertikai? apa sub-kelompok internal mereka dan pada apa mereka bergantung?
2. Apa yang menjadi persoalan konflik? Apa mungkin membedakan antara posisi, kepentingan (kepentingan materi, nilai, hubungan) dan kebutuhan?
3. Apa hubungan antara pihak-pihak yang bertikai? Apakah ada ketidaksimetrisan kualitatif dan kuantitatif?

4. Apa persepsi penyebab dan sifat konflik diantara pihak-pihak yang bertikai?
5. Apa perilaku akhir-akhir ini pihak-pihak yang bertikai (apakah konflik dalam fase eskalasi atau fase deeskalasi)
6. Siapa pemimpin pihak-pihak yang bertikai? pada tingkat elite dan individual, apa tujuan, kebijakan, kepentingan, kekuatan dan kelemahan relative mereka?

Satu model lain pemetaan konflik multidisipliner dikembangkan oleh sosiolog dari United Nations-University for peace, Amr Abdalla, yaitu model SIPABIO (2002). SIPABIO adalah :

1. Source (sumber konflik)
2. Issues (isu-isu)
3. Parties (pihak-pihak)
4. Attitudes/feelings (Sikap)
5. Behaviour (prilaku/tindakan)
6. Intervention (campur tangan pihak lain)
7. Outcome (hasil akhir)

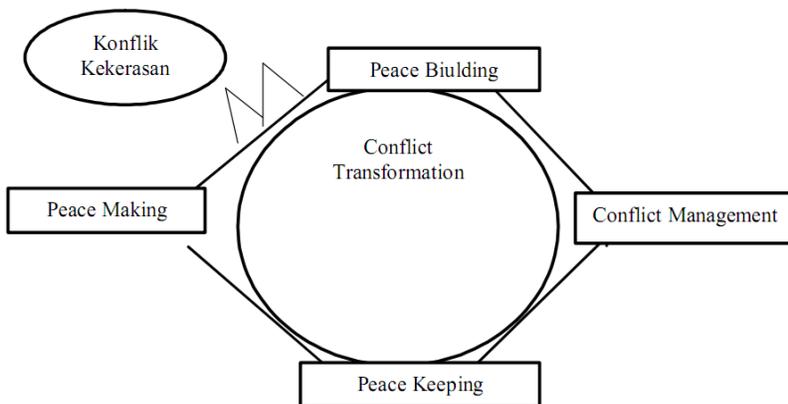
Sedangkan, menurut Fisher tahapan dinamika konflik meliputi pra konflik, konfrontasi, krisis, akibat dan pasca konflik. Lebih rinci akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Pra konflik adalah periode pada saat terdapat suatu ketidaksesuaian sasaran diantara dua pihak atau lebih sehingga timbul konflik. Konflik tersembunyi dari pandangan umum, meskipun satu pihak atau lebih mungkin mengetahui potensi terjadinya konfrontasi. Mungkin terdapat ketegangan hubungan diantara beberapa pihak dan/atau keinginan untuk menghindari kontak satu sama lain pada tahap ini.
2. Konfrontasi memperlihatkan satu tahap pada saat konflik mulai terbuka. Jika hanya satu pihak yang merasa ada masalah, mungkin para pendukungnya mulai melakukan aksi demonstrasi atau perilaku konfrontatif lainnya. Ladang pertikaian atau kekerasan pada tingkat rendah lainnya terjadi diantara kedua pihak
3. Krisis adalah puncak konflik. Tahap ketika konflik pecah menjadi aksi-aksikekerasan yang dilakukan secara intens dan massal. Konflik skala besar, ini merupakan periode perang, ketika orang-orang dari kedua pihak terbunuh. Akibat menunjukkan pada situasi yang disebabkan oleh pecahnya konflik pada tahap krisis. Bisa jadi salah satu pihak menang peperangan, atau kalah dan bahkan

keduanya mengalami kekalahan bersama. Situasi ini sangat tergantung pada proses penanganan konflik. Jika kedua belah pihak mampu melakukan negosiasi dan menggunakan strategi pemecahan masalah (problem solving) kemungkinan situasi yang dihasilkan cukup positif dan mengurangi jumlah kerugian bersama. Pada beberapa kasus strategi contending yang menghasilkan penerapan hasil kalah menyebabkan kerugian yang besar. Pada tahap ini tingkat kekerasan menurun dengan disertai menurunnya berbagai bentuk konfrontasi pihak-pihak berkonflik, ditariknya kekuatan-kekuatan bersenjata dan mulai munculnya inisiatif resolusi konflik

4. Pasca konflik adalah situasi diselesaikan dengan cara mengakhiri berbagai konfrontasi kekerasan, ketegangan berkurang dan hubungan mengarah lebih normal diantara kedua belah pihak.

Kesemua proses di atas merupakan bagian dari conflict transformation, yaitu suatu proses menanggulangi berbagai masalah dalam konflik, sumber-sumber dan konsekwensi negative konflik. Transformasi konflik sendiri merupakan proses jangka panjang. Dalam konteks masyarakat dalam konflik kekerasan, proses transformasi konflik bisa dilihat pada gambar intervensi konflik sebagai berikut :



Dalam masyarakat yang terlibat dalam konflik kekerasan, proses *peace building* terhambat atau terhenti sama sekali, sehingga intervensi pertama adalah *peace making* yang digunakan untuk menciptakan keadaan kedamaian negative terlebih dahulu. Setelah perang bisa dihentikan, namun potensi masih tetap

mengancam maka program selanjutnya adalah *peace keeping* untuk mencegah perang atau kekerasan pecah kembali. Pada periode tertentu *peace keeping* telah dianggap mampu menjaga perdamaian negative, maka langkah selanjutnya adalah program *conflict management*. Yaitu mengelola konflik nirkekerasan melalui proses-proses politik seperti negosiasi dan mediasi untuk memecahkan masalah. Ketika pemecahan masalah telah terbentuk maka kesepakatan harus diimplementasikan dalam bentuk program-program *peace building* masyarakat pasca konflik.

### **Analisis Konfigurasi Konflik Agama Dan Etnik**

Sebagai bangsa yang memiliki dengan tingkat keragaman budaya yang sangat kaya, Bangsa Indonesia diperhadapkan pada suatu persoalan serius yakni adanya sebetulnya “kesetiaan ganda”. Kesetiaan ganda itu mewujudkan dalam rivalitas internal antara identitas ke-Indonesia-an versus identitas ke-agama-an atau ke-etnis-an. Upaya syariatisasi yang dilakukan golongan Islam tertentu dan juga upaya penegakan khilafah Islamiyyah adalah beberapa contoh bagaimana susahnya lepas dari cengkraman “kesetiaan ganda”. Islam sebagai agama mayoritas diperhadapkan pada tantangan idealisasi keislaman yang dianggap bertentangan dengan semangat ke-Indonesia-an. Rivalitas ini menghasilkan sebuah konfigurasi konflik laten yang sewaktu-waktu bisa termanifestasi dalam wujud konflik yang lebih besar.

Meski eskalasi konflik etnis versus Negara tidak sehebat agama, namun fundamnetalisme etnisitas juga menjadi ancaman yang serius bagi Bangsa Indonesia. Misalnya konflik di Papua dan juga pemberontakan yang tidak pernah mati seperti RMS menjadi pekerjaan rumah tersendiri aparat Pemerintah untuk mewujudkan ke-Indonesia yang utuh. Bukti paling nyata adalah terjadinya gelombang konflik dengan kekerasan yang terjadi di Indonesia pada akhir Orde Baru yang mengakibatkan sedikitnya 9000 orang tewas dan lebih dari 85% korban tewas diakibatkan oleh bentrokan antar kelompok etnis di 15 kabupaten. Sejak saat itu kekerasan berskala besar yang terkonsentrasi tersebut telah mereda. Tidak jelas apakah penurunan itu bersifat permanen. Temuan komparatif dari Negara lain mengindikasikan bahwa kekerasan sering muncul kembali di wilayah yang dahulu mengalami konflik.

Sebagai masyarakat yang multi-etnik dan multi-agama, Indonesia masih rentan mengalami kemungkinan konflik dengan kekerasan jangka panjang kecuali jika lembaga-lembaga dan kebijakan-kebijakan yang dirancang dan diterapkan secara tepat.

Julian dalam Soetomo<sup>1</sup> menyatakan bahwa masalah sosial yang berasal dari konflik nilai juga dapat dijumpai dalam masyarakat yang kompleks yang mengenal adanya isu minoritas dan mayoritas. Minoritas adalah sekelompok orang yang tidak menerima perlakuan yang sama dibandingkan dengan kelompok lain dalam masyarakat yang sama. Isu minoritas dan mayoritas selama ini memang mengambil porsi dalam kejadian konflik agama dan juga konflik suku.

Bentuk konflik di Indonesia pada awalnya mengambil 2 bentuk yakni:

1. Konflik horizontal yaitu konflik antar anggota masyarakat baik didasari atas alasan agama, etnik, masalah ekonomi dan sebagainya
2. Konflik Vertikal yaitu konflik antar masyarakat dan Negara. Secara khusus konfigurasi konflik agama dan etnik mengambil dua bentuk baik secara horizontal maupun vertical. Konfigurasi konflik agama dan etnik di Indonesia disebabkan, salah satunya, oleh sikap intoleransi. Intoleransi agama sendiri menurut Bruce Robinson<sup>1</sup> mengambil bentuk 4 pola yakni : <sup>3</sup>

1. Inter-faith intolerance (e.g. Islam-Christian conflict)
2. Intra-faith intolerance (e.g. Shi'ite vs Sunni Muslims)
3. Intolerance by from a faith group against a secular group (e.g. Christian fundamentalism vs agnostics, Atheists, humanists, homosexuals, transsexuals, loving, committed same-sex couples who wish to marry, etc)
4. Intolerance by a secular group against a religious group. (e.g. feminist vs some organized religious)

Bruce A Robinson kembali menambahkan bahwa tindakan yang muncul dari sikap intoleransi adalah sebagai berikut :

1. *Spreading misinformation about a group's beliefs or practice even though the inaccuracy of that information could have been easily checked and corrected* (penyebaran

---

<sup>1</sup> Soetomo, *Masalah Sosial dan Pembangunan*, Jakarta PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995, hal. 36.

<sup>1</sup> [www.religioustolerance.org](http://www.religioustolerance.org)

informasi yang salah tentang kelompok kepercayaan atau praktik, meski ketakakuratan informasi tersebut bisa dengan mudah dicek dan diperbaiki)

2. *Spreading hatred about an entire group; e.g. stating or implying that all members of a group are evil, behave immorally, commit criminal acts, etc.* (Penyebaran kebencian mengenai seluruh kelompok; misalnya menyatakan atau menyiratkan bahwa semua anggota kelompok tertentu itu jahat, berperilaku tidak bermoral, melakukan tindak pidana dan sebagainya).
3. *Rediculing and belittling an entire faith group for their sincerely held beliefs and practice* (Mengejek dan meremehkan kelompok iman tertentu untuk kepercayaan dan praktik yang mereka anut).
4. *Attempting to force religious beliefs and practices on others against their will* (mencoba untuk memaksa keyakinan dan praktik keagamaan kepada orang lain agar mengikuti kemauan mereka).
5. *Restricting human rights of members of an identifiable religious group* (Pembatasan hak asasi manusia anggota kelompok agama yang bisa diidentifikasi)
6. *Devaluing other faith as worthless or evil* (mendevaluasi agama lain sebagai tidak berharga atau jahat)
7. *Inhibiting the freedom of a person to change their religion* (menghambat kebebasan seseorang untuk mengubah agama mereka)

Kajian Glock yang diungkapkan oleh Samsul Arifin<sup>1</sup> memperjelas kaitan antara konflik dan kekerasan dengan kondisi deprivasi relatif (istilah yang dimunculkan oleh Gurr) yang dialami manusia.

*Glock membagi deprivasi dalam lima karakteristik. Pertama, deprivasi ekonomi, yakni keterbatasan pendapatan akses terhadap sumber-sumber ekonomi yang dibutuhkan dalam hidup. Kedua, deprivasi sosial. Deprivasi ini terjadi pada orang-orang yang tidak memiliki prestasi, kekuasaan, status sosial, dan kesempatan berpartisipasi dalam berbagai aktifitas dan organisasi. jenis*

---

<sup>1</sup> Syamsul Arifin, *Studi Islam Kontemporer; Arus Radikalisasi dan multikulturalisme di Indonesia*, Malang; Intrans Publishing, 2015, hal 6.

*deprivasi ini menurut Glock merupakan kelanjutan dari deprivasi yang pertama, meskipun tidak selalu berhubungan secara ketat.....Ketiga, deprivasi organismic. deprivasi yang disebabkan keterbatasan fisik, kesehatan dan mental. Keempat, deprivasi etik. Deprivasi ini mengacu pada individu yang kesulitan memaknai hidupnya tidak bisa memutuskan arah dan proses yang harus dilalui untuk menemukan makna tersebut. Kelima, deprivasi fisik. Ini dialami individu yang tidak pernah puas dengan semua penghargaan yang diterima dari masyarakatnya terutama yang berbentuk pengakuan sosial.*

Adapun konflik antar etnik disamping juga mengambil beberapa poin penting dalam intoleransi agama namun juga dalam beberapa aspek (dari pengalaman Indonesia) disebabkan oleh kelompok etnik mayoritas kurang mendapat “pembagian” ekonomi yang layak juga kelompok etnis mayoritas menganggap kelompok etnis minoritas melecehkan budaya atau orang etnis mayoritas.

Secara umum konflik di Indonesia dapat dikategorisasi dalam cakupan peristiwa sebagai berikut :

1. Konflik yang bernuansa separatism misalnya konflik NAD, Maluku dan Papua
2. Konflik bernuansa etnik misalnya konflik Kalbar, Kalteng, Papua
3. Konflik yang bernuansa ideologis misalnya konflik isu faham komunis dan isu faham radikal
4. Konflik yang bernuansa politik misalnya konflik akibat PILKADA dan Isu pemekaran wilayah
5. Konflik yang bernuansa ekonomi misalnya konflik konflik antar pedagang, kelompok tani dan nelayan, konflik preman dan sebagainya
6. Konflik sosial dengan memakai massa atas dasar solidaritas kelompok misalnya perkelahian antar supporter bola, tawuran mahasiswa dan pelajar
7. Konflik agama atau aliran kepercayaan misalnya isu aliran sesat
8. Konflik isu kebijakan pemerintah misalnya konflik sekitar naiknya harga BBM dan sebagainya.

Pemaparan diatas mengindikasikan bahwa secara implisit sumber konflik dalam aras agama didasarkan atas penolakan pada

pola hidup multicultural. Multikulturalisme sendiri dalam Reed<sup>1</sup> menyatakan bahwa multikulturalisme adalah sebuah masyarakat yang memiliki kebudayaan yang berlaku umum dalam masyarakat yang coraknya seperti mozaik. Di dalam mozaik tercakup semua kebudayaan dari masyarakat-masyarakat lebih kecil yang membentuk terwujudnya masyarakat yang lebih besar, yang mempunyai kebudayaan seperti sebuah mozaik tersebut.

Sebenarnya apa yang dipertegas oleh Reed telah menjadi akar kultural Bangsa Indonesia yang dipertegas oleh konstitusi yakni Pasal 32 UUD 1945 yang berbunyi : “Kebudayaan Bangsa (Indonesia) adalah puncak-puncak kebudayaan daerah.” Disamping itu Negara harus sedapat mungkin mengerahkan seluruh komponen dan wewenangnya agar keutuhan berbangsa dan bernegara dapat dijamin dan perpecahan atau disintegrasi bangsa dapat dihindari. Kebijakan Politik dan sosial hendaknya menjadikan kemajemukan yang saling menghormati dan saling menjaga menjadi aras kebijakan perencanaan sosial. Solidaritas sosial harus diwujudkan antar warga yang berbeda dan ini disamping menjadi tanggung jawab pemerintah juga menjadi tanggung jawab tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh adat agar mereka mampu melakukan penyadaran pada umat atau komunitas ada yang dipimpinnya.

### **Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat dihasilkan dalam tulisan singkat ini adalah :

1. Bahwa akar konflik agama dan etnis pada dasarnya disebabkan oleh banyak factor. Di dalam konflik agama, factor yang paling dominan adalah intoleransi agama. Sementara dalam konflik etnis lebih banyak disebabkan oleh tindak ketidakadilan ekonomi dan pelecehan kebudayaan
2. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang sejak berdirinya telah mencanangkan kehidupan bersama yang berciri multikultural dimana setiap tindakan radikalisme atas nama agama dan etnis bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa dan konstitusi Negara.

---

<sup>1</sup> Reed, *Multi-America: Essay On Culture Wars and Peace* , USA ,Penguin, 1997, hal 205.

## **Rojabi Azharghany | Perdamaian dan Multikulturalisme**

3. Negara hendaknya memainkan perang penting dalam merencanakan sebuah langkah strategis dan taktis dalam upaya untuk mencegah secara preventif perpecahan atau disintegrasi bangsa secara tegas namun tetap menghormati hak asasi manusia.
4. Tokoh agama dan tokoh adat hendaknya bisa menjadi suri tauladan bagi umat dan kaumnya dalam bagaimana berprilaku kehidupan berbangsa yang selaras dengan falsafah bangsa Indonesia yakni Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

- Annual Report The Canadian Multiculturalism Act, 2005-2006*, Canadian Heritage, [www.multiculturalism.pch.gc.ca](http://www.multiculturalism.pch.gc.ca) diakses tanggal 28 Mei 2015
- Arifin, Syamsul, 2015, *Studi Islam Kontemporer; Arus Radikalisasi dan multikulturalisme di Indonesia*, Intrans Publishing, Malang.
- Bakri, Syamsul, 2004, *Islam dan Wacana Radikalisme Agama Kontemporer*, Jurnal DINIKA Vol. 3 No. 1, January 2004
- Bourne, Jenny, 2007, *In Defence of Multiculturalism*, Institute of Race Relation, UK.
- Bruce A Robinson, *Religious Intolerance*, dalam [www.religioustolerance.org/relintol1/htm#def](http://www.religioustolerance.org/relintol1/htm#def) diakses 27 Mei 2015.
- Imron, Ali, A.M., *Resolusi Konflik Antaretnis dan Antaragama: Perspektif Multikultural*, Jurnal Kebudayaan Akademika, Vol 4, No 1, April 2006.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, cet. th. 1995, Balai Pustaka.
- Mezecnikov, Grigorij, *National and Right-Wing Radicalism in the New Democracies: Slovakia*, Paper for the workshop of the Friedrich Ebert Foundation on "Right-wing extremism and its impact on young democracies in the CEE countries", 2009.
- Partanto, Pius A dan M. Dahlan Al-Barry, 1994, *Kamus Ilmiah Populer*, penerbit Arkola, Surabaya.
- Reed, 1997, *Multi-America: Essay On Culture Wars and Peace*, Pinguin, USA.
- Soetomo, 1995, *Masalah Sosial dan Pembangunan*, PT. Dunia Pustaka Jaya, Jakarta
- Van Hoeve, 1984, *Ensiklopedi Indonesia*, Ikhtiar Baru, Jakarta
- Zinga, Dawn, 2006, *Navigating Multiculturalism: Negotiating Change*, Cambridge Scholars Press, Newcastle UK.